

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masyarakat Desa Sebagai Masyarakat Hukum.....	12
B. Pemerintahan Desa Dibawah Pemerintahan Daerah.....	19
C. Proses Pemilihan Kepala Desa.....	25
1. Tahapan Pemilihan Kepala Desa.....	27
D. Proses Pengangkatan Perangkat Desa.....	30
1. Persyaratan Pengangkatan.....	31
2. Tata Cara Pengangkatan.....	33

E. Pengertian Dan Konsep Konflik Kepentingan Pada Aneka Produk Hukum Di Indonesia.....	35
F. Pembatasan Hak Politik Guna Mencegah Konflik Kepentingan.....	43
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Konflik Kepentingan.....	43
2. Tinjauan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Sebagai Hak Yang Dapat Dikurangi (<i>Derogable Rights</i>)	45

BAB III CARA PENELITIAN

A. Materi Penelitian.....	52
1. Jenis dan Sumber Data.....	52
2. Lokasi Penelitian.....	55
B. Subjek Penelitian.....	55
C. Alat Penelitian.....	55
D. Jalannya Penelitian.....	55
E. Kendala Penelitian.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pengangkatan Aparatur Desa Yang Memiliki Hubungan Darah Dan Keberterimaan Masyarakat Desa Atas Aparatur Desa Tersebut.....	59
1. Legalitas Pengangkatan Keluarga Kepala Desa Sebagai Perangkat Desa.....	59
2. Penerimaan Masyarakat Desa Terhadap Pengangkatan Keluarga Kepala Desa.....	68
B. Konsep Hukum Yang Perlu Dikembangkan Untuk Mengatasi Politik Dinasti Di Pemerintahan Desa.....	80

1. Perlunya Pembatasan Hak Politik Bagi Keluarga Kepala Desa.....	83
2. Perlunya Pengaturan Agar Calon Perangkat Desa Yang Dikonsultasikan Kepada Camat Paling Sedikit Berjumlah 3 (tiga).....	84
3. Perlunya Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa.....	85
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90